

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah. Rumusan masalah yang penulis teliti adalah: 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?, 2. Mengapa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan Sebagian gugatan penggugat?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, 2. Untuk mengetahui Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan Sebagian gugatan penggugat.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap, sistematika hukum, yang bersifat mendeskripsikan, menggambarkan suatu peristiwa yang sejelas mungkin terkait dengan rumusan masalah di atas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 1. alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahkamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 2. Alasan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian gugatan Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah: 1. alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahkamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena: Gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil, yaitu: Kurang pihak dan Gugatan kabur, 2. Alasan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian gugatan Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah, karena Gugatan penggugat memenuhi syarat formil, yaitu: Tindakan Tergugat (BWS Papua) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, tergugat tidak beritikad baik, para penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam kepemilikan tana, dan proses pelepasan hak tahun 2019 oleh Ondoafi tidak sah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka Paran dari penulis bagi masyarakat, pemerintah, dan Pengadilan adalah: 1. pemerintah harus mematuhi prosedur hukum, termasuk melakukan ganti rugi secara adil dan transparan kepada pemilik tanah, 2. Masyarakat harus lebih jelas dalam mengajukan sebuah gugatan supaya tidak ada kekeliruan dikemudian hari, 3. Pengadilan harus tegas dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum supaya adil dan tidak membawa kerugian bagi orang lain.

Kata kunci: Sengketa tanah, penguasaan oleh pemerintah, perbuatan melawan hukum, putusan hakim, pengadilan

ABSTRACT

Title: Description of Judge's Decision in Land Control Dispute by Government. The problem formulation that the author researched is: 1. Why did the District Court and Cassation Judges at the Supreme Court declare the plaintiff's lawsuit inadmissible?, 2. Why did the Appeal Judge at the High Court grant part of the plaintiff's lawsuit?. The purpose of this research is: 1. To find out the reasons why the District Court and Cassation Judges at the Supreme Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible, 2. To find out the Appeal Judge at the High Court granted part of the plaintiff's lawsuit.

The type of legal research used is normative research which includes research on legal principles, research on legal systematics, which is descriptive in nature, describing an event as clearly as possible related to the formulation of the problem above. The independent variables in this research are: 1. the reasons why the District Court and Cassation Judges at the Supreme Court stated that the Plaintiff's Lawsuit was unacceptable, 2. The reasons why the Appeal Judge at the High Court granted part of the lawsuit in the Land Control Dispute by the Government. The dependent variable in this research is the Judge's Decision in the Land Control Dispute by the Government.

Based on the results of the research conducted by the author, the conclusion that the author found in accordance with the problems that the author has described above is: 1. The reasons why the District Court and Cassation Judges at the Supreme Court stated that the Plaintiff's Lawsuit was unacceptable, because: The plaintiff's lawsuit did not meet the formal requirements, namely: Lack of parties and the lawsuit was unclear, 2. The reasons why the Appeal Judge at the High Court granted part of the lawsuit in the Land Control Dispute by the Government, because the plaintiff's lawsuit met the formal requirements, namely: The Defendant's actions (BWS Papua) were a form of unlawful act, the defendant did not act in good faith, the plaintiffs had legal standing or legal standing in land ownership, and the 2019 rights release process by Ondoafi was invalid.

Based on the conclusions described above, the author's recommendations for the community, government, and courts are: 1. The government must comply with legal procedures, including providing fair and transparent compensation to land owners, 2. The community must be clearer in filing a lawsuit so that there are no mistakes in the future, 3. The court must be firm in resolving cases of unlawful acts so that they are fair and do not cause harm to others.

Keywords: Land disputes, government control, unlawful acts, judge's decisions, courts